



KORUPSI

Pemkab Siapkan Lawyer

MANGUPURA - Dua pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Badung ditetapkan sebagai tersangka pada dua kasus yang berbeda. Yakni Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung berinisial AAGD, terduga kasus korupsi proyek pembangunan Tukad Mati di Legian, Kuta, Badung. Juga Kasi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berinisial I Ketut SKTY pada kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Mangusada.

Atas kejadian ini, kalangan anggota DPRD Badung pun meminta untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa PNS Badung tersebut ■

► Baca *Pemkab...* Hal 27

Dewan Minta Diusut Tuntas

■ PEMKAB

Sambungan dari hal 17

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Badung Nyoman Sentana menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut adalah cambuk sekaligus tamparan bagi pemerintah.

"Ini cambuk buat kami di Pemkab Badung agar kami dapat melihat dengan jelas. Bahwa apa yang dikerjakan itu mengandung bentuk tanggung jawab. Baik secara pribadi maupun niskala," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (2/8).

Anggota Komisi IV DPRD Badung ini mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Karena bisa saja ada pihak lain yang terlibat. "Jangan sampai berhenti pada yang bersangkutan saja. Siapa tahu yang lain-lain ada juga," tandasnya.

Pihaknya juga akan berembuk terlebih dulu dengan jajaran dewan lain untuk mengambil sikap. Karena ini tamparan bagi Badung. Selain itu, politisi Gerindra asal Abiansemai ini juga menegaskan tidak akan ada perlindungan bagi yang bersangkutan kalau memang benar-benar terbukti terlibat. "Tidak ada perlindungan. Bupati *kan* tegas. Tidak mungkin beliau melindungi orang-orang seperti ini. Begitu juga kami di DPRD. Karena sudah ditangani secara hukum, kami serahkan sepenuhnya kepada polisi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa yang ditemui di Puspem Badung, kemarin menyatakan sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalani kedua bawahannya. Namun, semua pihak juga harus menghormati azas praduga tak bersalah, sebelum ada keputusan berkekuatan hukum tetap.

"Hukum adalah panglima di negara kita. Jadi, kami menghormati proses hukum yang sedang dijalani kedua staf kami," terang Suiasa.

Disinggung apa Pemkab Badung lakukan pendampingan hukum. Wabup mengatakan Pemkab Badung tentu akan memberi pendampingan hukum melalui tim hukum yang dimiliki Pemkab Badung. Pendampingan hukum dimaksudkan yakni memberi saran dan masukan berkaitan dengan hukum. Sehingga proses hukum yang dijalani keduanya dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kalau kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan tidak perlu takut, tapi harus tetap hati-hati. Bapak Bupati sering mengingatkan agar tidak terjerat kasus hukum, *ya* jangan melanggar hukum," pungkasnya. (dwi/pit)

Edisi : Kamis, 3 Agustus 2017

Hal : 17 dan 27